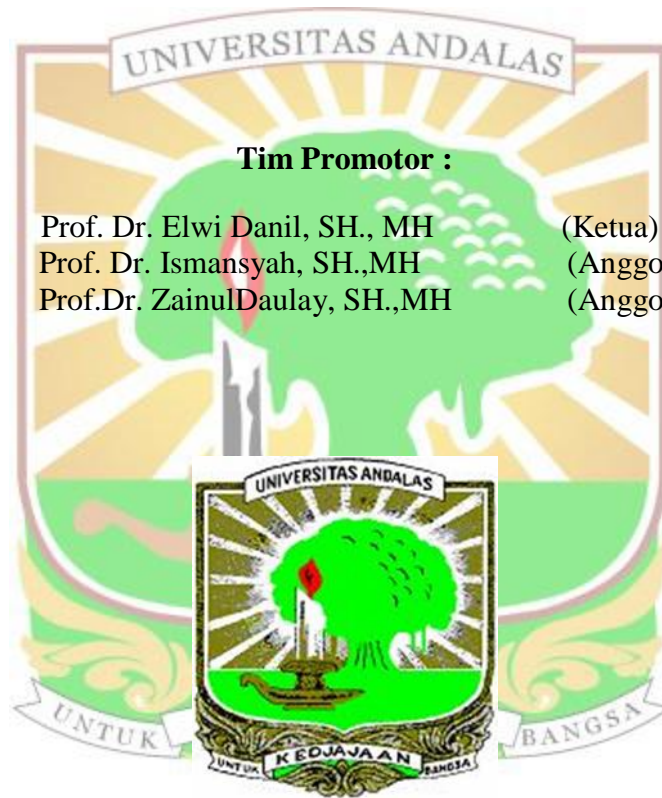


Disertasi

**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI :
Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Oleh :

SUKMARENI
NIM.1131203002



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Pengaturan Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Oleh : Sukmareni

(Tim Pembimbing : Prof.Dr. Elwi Danil, SH.,MH, Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH,
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH)

ABSTRAK

Kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*, penegakan hukumnya memerlukan cara dan instrumen yang luar biasa juga (*extra ordinary measure and instrumen*). Hal ini terlihat dalam kewenangan penyidikannya yang diberikan kepada tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, beda dengan penyidikan tindak pidana umum yang hanya merupakan kewenangan penyidik Kepolisian. Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan penyidikan demi membebaskan Indonesia dari korupsi. Namun pada prakteknya masing-masing institusi cenderung terbelenggu dengan sikap fragmentaris dan institusi sentris yang tidak mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang; (1) Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, (3) Model yang ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum sebagai bahan utama, sedangkan data primer berupa wawancara dan data pelaksanaan penyidikan oleh ketiga lembaga hanya digunakan untuk membantu mempertajam analisis secara kualitatif mengenai implikasi model kewenangan penyidikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, memberikan kewenangan kepada tiga lembaga untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dengan kewenangan yang tidak sama dimana kewenangan KPK lebih luas dibandingkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, terlihat dalam kewenangan supervisi, koordinasi, penyadapan, penyitaan dan lainnya, dan secara administratif masih sendiri-sendiri. (2) Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terlihat substansi, struktur dan politis hukum yang ada belum mengatur pemberian kewenangan secara tegas, sinkron, dan integral sehingga berdampak pada posisi lembaga, independensinya, hubungan antar penyidik (koordinasi), hal ini bukannya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan memperlambat, (3) Model ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia menurut penulis, masih tetap diberikan kepada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan pemberian kewenangan yang sama sesuai dengan sifat tindak pidana yang akan disidik sama tindak pidana korupsi, dengan pembenahan mekanisme koordinasi ke arah yang lebih baik dan sistem pengawasan yang terpadu tidak terpecah-pecah seperti yang ada sekarang.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidikan, Model Ideal, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**IMPLICATION OF REGULATION ON INVESTIGATOR'S POWER TO THE EFFORT
IN FASTENING CORRUPTION ERADICATION :
A Study on Ideal Regulation for Investigating Corruption Cases in Indonesia**

By : Sukmareni

(Promotors: Prof.Dr Elwi Danil, SH.MH, Prof..Dr. Ismansyah, SH.MH, and
Prof. Dr Zainul Daulay, SH.MH)

ABSTRACT

Authority to investigate corruption as an extra ordinary crime, law enforcement requires an extra ordinary measure and extra ordinary legal instrument This can be seen in the investigative authority given to three institutions, the Police, Attorney and the KPK, in different to the investigation of geeral crimes which are only the Police investigator.. All three are (three institutions) expected to cooperate in conducting investigations to free Indonesia from corruption, but in practice each institution tends to be shackled with a fragmentary and institutions centric attitude that do not support the acceleration of the eradication corruption. The research aimsto analyze: (1) Regulation of investigation powers so as to accelerate corruption eradication in Indonesian, (2) The implication of the regulatinl of investigation powers to the effort for accelerating corruption eradication within Indonesian positive criminal law, and (3) The ideal model of investigation powers in the effort for accelerating corruption eradication in ius constituendum perspektif in Indonesian. This study is a descriptive research, employing a normative legal approach, using secondary legal materials as a primary source. However, the primary legal materials such as interviews. The data concerning the implementation of investigation conducted by three law enforcement institutions are to support and to sharpen the qualitative analysis for the implication of the model of investigation powers to eradicate the existing corruption cases. This Research finds out that: (1) the reguation of investigation powers for corruption in an effort to accelerate the corruption eradication in Indonesian is the empowerment to the three institutions, Police, Attorney, and the Corruption Eradication Commission (KPK). the powers given to the institutions differs one to another. In this case, the powers of KPK are larger compared to Police and Attorney, as seen in the supervising, coordinating, tapping and confiscating powers vested to KPK. (2) the existing regulation of investigation results in the legal implication either legal substance, structure and legal politicor practically. The existing legal substance does not yet specify the distribution the powers firmly, sincronically and integrally so as to affect the position of the institution, such as independency, coordination. This does not accelerate but slow down the corruption eradication. (3) The ideal model of investigation powers in an effort to accelerate the eradication of corruption of ius cosntituendum perspektive, must be consistently distributed to the three institutions, notably Police, Attorney and KPK, and the powers must be equal to the nature of the crime which will be investigated, through the revision of coordination mechanism toward a better system of supervision unlike today condition -- disintegrated.

Key Words: Investigation of authority, Ideal Model, Corruption Eradication.

**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

DISERTASI

*Diajukan untuk memperoleh derajat Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

**Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Andalas
Pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Oktober 2018**

Oleh :
SUKMARENI
NIM.1131203002

Lahir di Bukittinggi, Tanggal 16 Oktober 1963



**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Oleh :

SUKMARENI
NIM.1131203002

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Doktor dalam Ilmu Hukum ini telah disetujui oleh Tim Promotor dan tanggung jawab seperti tertera di bawah ini



Prof.Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Co-Promotor

Prof.Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H
Co- Promotor

Mengetahui :
Program Doktor Ilmu Hukum
Pk. Koordinator

Prof.Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H
NIP. 195911221986031002
Lembaran Pengesahan
Disertasi Untuk Ujian Terbuka